

Systematic Literature Review: Multi Aspek Implementasi Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah

Zulkarnaini¹, Islahuddin², Syukriy Abdullah³, Afra Fahira⁴

Universitas Syiah Kuala^{1,2,3}, Politeknik Negeri Lhokseumawe⁴

zulkarnaini@pnl.ac.id, islahuddin@usk.ac.id, syukriyabdullah@usk.ac.id,

afrafahira01@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 9 Juni 2024

Disetujui : 25 Juni 2024

Dipublikasi : 1 Oktober 2024

ABSTRACT

New Public Governance (NPG) in the scope of government as a public sector practice has changed over the last 2 (two) decades. This phenomenon has had a significant influence on various aspects of the regional government system resulting from the reform of the Fiscal Decentralization System (SDF). The aim of the research is to find out to what extent the aspects resulting from the implementation of SDF by various countries in the world since the implementation of decentralization in early 2000. The research method used is a systematic literature review of 61 articles sourced from the Scopus database from 1999-2024. In its implementation, SDF becomes the basis for regional governments in determining budget programs on the basis of delegation of authority and power from the central government. The impact of implementation, which covers multi-aspects such as administrative governance, financial governance, public services, and interconnection of central and local governments, has reflected the "freedom" of a local power. However, political problems have signaled that there are complex characteristics of internal local government problems.

Keywords: Multi aspects, Fiscal Decentralization System (FDS), administrative, financial, public service, interconnection.

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan baru yang ditandai dengan berlakunya teori New Public Governance (NPG) sekitar awal tahun 2000 telah membawa paradigma baru dalam lingkungan sektor publik. Kehadiran NPG merupakan penyempurnaan atas kekurangan dari teori New Public Management (NPM) yang sesungguhnya telah banyak mengubah wajah sektor publik dalam berbagai aspek (misalnya dalam sektor akuntansi manajemen yang mampu menghilangkan kendali politik lokal (Tambulasi, 2007)) dan sangat ditekankan pada pelaksanaan administrasi khususnya dalam lingkup pemerintahan. Menurut Grossi dan Argento (2022) bahwa tata kelola publik berkembang menjadi lebih inklusif dan kompleks yang mengakibatkan praktik akuntansi menjadi lebih baik dalam menghasilkan akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran sampai kepada pelaporan keuangan. Kondisi ini harus disikapi lebih responsif oleh pemerintah dalam menjalankan operasional baik di tingkat pusat maupun daerah melalui sistem desentralisasi atau dikenal dengan istilah Sistem Desentralisasi Fiskal (SDF) yang mampu memberikan solusi yang logis dan lebih relevan. Sasaran desentralisasi sebagai sebuah sistem yang diharapkan melahirkan kemandirian, sangat tepat menjadi pilar bagi pemerintah daerah khususnya dalam mencapai titik kinerja yang efektif dan efisien. Oleh karena itu sistem desentralisasi diperuntukkan bagi "kebebasan" pemerintah daerah melalui hak otonomi yang dimiliki.

Adanya hak otonomi bagi pemerintah daerah, merupakan cerminan dari kapabilitas daerah yang harus dimanfaatkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerah atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menciptakan tingkat kemandirian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Daerah dituntut untuk

dapat meningkatkan kemampuan daerah sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kapasitas pemerintah pusat yang diatur dalam sistem desentralisasi telah dibatasi dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemerintah daerah mampu dalam meningkatkan peran dan fungsinya dan oleh dirinya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh positif yang terdapat di sebagian kecil Kabupaten di Jawa Tengah Indonesia bahwa model manajemen praktik inovasi terhadap pelayanan publik telah dilakukan dengan sangat baik (Santoso et al., 2023). Namun sejauh ini, peran pemerintah pusat dalam mengatur dan memonitoring kondisi daerah tetap dilaksanakan sebagai wujud tanggungjawab dalam menjalankan sistem pemerintahan negara.

Secara umum, implementasi sistem atau SDF diberbagai negara hampir sama dan memiliki tujuan yang serupa. Perbedaan hanya terletak pada kultur dan lingkungan sosial masyarakat, serta fenomena politik yang menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Untuk memperoleh perbandingan, dapat dilihat bagaimana SDF berjalan dimasing-masing negara dengan perlakuan pada berbagai aspek yang berbeda. Hasil penelitian Vyas (2018) pada pemerintahan daerah Hong Kong lebih ditekankan pada adanya wewenang penuh bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), yang sebelumnya dikelola secara terpusat. Berbeda dengan Negara China, (Zhang & Zhu, 2019) dimana implementasi desentralisasi pemerintah daerah dan pusat saling bergantung satu sama lain, sehingga dukungan kebijakan pemerintah pusat dapat menggantikan tekanan horizontal. Tidak jauh berbeda dengan negara yang berada diluar Asia, bahwa di Spanyol pemerintah daerah telah menekankan praktik desentralisasi lebih kepada transparansi fiskal (Esteller-Moré and Otero, 2012), sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan jelas. Masih melihat pengaruh implementasi SDF terhadap berbagai aspek di United States (McCabe et.al., 2016) telah memahami praktik administrasi publik secara profesional dari 4 (empat) atribut yaitu keyakinan terhadap asosiasi profesional, pelayanan publik, regulasi mandiri, serta keyakinan terhadap *calling* (kepedulian). Demikian pula yang terjadi di United Kingdom, ternyata implementasi desentralisasi meningkatkan akuntabilitas demokrasi pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat disamping akuntabilitas lainnya yang juga meningkat (Grubnic & Cooper, 2019). Berbagai negara tersebut telah mempraktikkan bagaimana sistem desentralisasi ternyata telah mampu mendorong berbagai aspek pemerintahan yang mampu memberikan sinyal positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, keberadaan sistem SDF mampu mempengaruhi berbagai aspek yang masih memiliki kendala diberbagai negara. Hal ini disebabkan karena masih adanya benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, atau adanya permasalahan yang sangat kompleks antar daerah atau lembaga pemerintah, sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi kendala. Faktanya bahwa selain manfaat positif yang ada di negara China, masih ditemukan adanya ketimpangan fiskal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penyamaan distribusi layanan publik, sehingga harus mempertimbangkan struktur administratif di tingkat lokal dan regional (H. Li et al., 2016). Hal lain juga terjadi di Nigeria, dimana negara tersebut masih memiliki kelemahan pelaksanaan sistem SDF yang saat ini berjalan, sehingga diperlukan adanya berbagai tindakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi agar membentuk sistem edukasi pemahaman bagi masyarakat (Community Education System) akan pentingnya memahami peran pemerintah daerah dalam melayani masyarakat (Shola and Jijoho, 2021). Demikian pula halnya di negara Philipina dimana sistem desentralisasi justru telah mengabaikan otonomi fiskal akibat adanya ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat sehingga peran pemerintah daerah akan berdampak negatif (Panao, 2020). Dari berbagai kasus yang terjadi diberbagai negara di dunia dengan kultur dan sosial yang berbeda, maka dapat dipastikan bahwa sistem SDF membutuhkan adanya komitmen dan konsistensi yang kuat oleh pemerintah untuk mencapai kinerja yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Berbagai inovasi baik dalam tata kelola maupun hubungan antar masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah daerah apabila sasaran dan fokus tujuan telah ditetapkan.

Studi Systematic Literature Review (SLR) ini akan membahas beberapa aspek yang diakibatkan oleh adanya implementasi sistem desentralisasi fiskal. Masing-masing aspek akan memberikan pandangan tersendiri bagi seluruh pihak yang berkepentingan sehingga mampu menjadi referensi positif bagi pengembangan sistem SDF selanjutnya. Dalam studi ini penulis akan menguraikan berbagai hasil penelitian yang mampu mendorong pemerintah untuk memperluas

pemahaman yang terdapat diberbagai negara, sehingga kontribusi terhadap masyarakat sebagai sasaran program akan lebih terjamin dan dapat dinikmati secara luas. Oleh karena itu sangat perlu untuk mengetahui bagaimana sistem SDF yang telah berjalan selama 2 (dua) dekade terakhir, dan diharapkan menjadi input yang dapat menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang menguraikan berbagai temuan terhadap implementasi SDF pada pemerintah daerah yang dapat memperkaya khasanah dari pentingnya pemerintah daerah menjaga stabilisasi baik sisi administrasi maupun keuangan daerah. Reformasi pemerintahan dalam bidang desentralisasi telah membawa dampak yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan daerah terutama dalam membangun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Walaupun pada dasarnya kapasitas kedua belah pihak telah tersistem sesuai aturan, namun masih terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja masing-masing pihak. Dengan demikian harus dapat dipahami bahwasanya SDF tidak hanya sekedar sistem yang dijalankan, namun mampu mempengaruhi berbagai aspek pemerintahan dan berdampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi ini diharapkan menjadi bagian perbaikan dan pengembangan berkelanjutan yang harus diakselerasi untuk mencapai tujuan.

Melalui kajian teori resentralisasi fiskal pro-lokal terhadap pendanaan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di Thailand, justru memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mengatasi dampak yang timbul akibat dari penggunaan dana tersebut (Gilley & Laochankham, 2024). Hal ini memberikan tingkat optimistik yang tinggi dalam menjalankan strategi dan perencanaan bagi pemerintah daerah. Aspek berbeda lainnya terkait sumber daya manusia atau tepatnya bagi pegawai pemerintah, telah dikaji dengan menggunakan model Job-Demands Resources (J-DR) di negara Netherlands yang menemukan adanya efek interaksi antara dukungan pimpinan terhadap tingkat kesejahteraan pegawai (Meer et al., 2024). Efek positif ini tidak terlepas dari adanya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga keterbukaan dan sikap kepedulian pimpinan melebihi nilai permintaan organisasi. Mengacu pada masalah ini, dapat dipahami bahwa sisi positif pelaksanaan SDF membuka paradigma secara psikologi menjadi lebih luas dalam konteks organisasi. Perkembangan SDF di Indonesia walaupun masih terbatas pada beberapa daerah yang berhasil mengembangkan inovasi pelayanan publik yang didasari atas 4 (empat) faktor utama yang meliputi kepemimpinan inovatif, kualitas tenaga kerja, sistem dan struktur serta pengaruh luar (Santoso et al., 2023), namun permasalahan karakteristik daerah harus menjadi pertimbangan yang rasional dalam menjalankan kebijakan SDF. Akibat dari implementasi yang muncul tidak harus diabaikan dan justru menjadi rekomendasi pengendalian yang efektif dan efisien agar sistem tetap berjalan.

Berbagai aspek yang muncul dari implementasi sistem SDF telah menjadi dasar pijakan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi kebijakan. Pertimbangan utama kemampuan daerah menjadi hal yang sangat utama dalam melaksanakan SDF sehingga tidak akan menimbulkan benturan yang berakibat tidak berjalannya tata kelola yang baik. Dalam pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Tiongkok, (Xue et al., 2023) menemukan bahwa pemerintah daerah justru memiliki kekuatan dalam bentuk sentralisasi reformasi kebijakan County-to-District (CtD), dimana wewenang penuh pemerintah daerah telah berdampak bagi pelaksanaan ESG (Environmental, Social and Governance) perusahaan di daerah. Hal ini sangat menguntungkan daerah, karena seluruh kontrol sistem yang berdampak bagi ESG dapat dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, dan hal ini membuktikan bahwa karakteristik daerah tetap terjaga dengan baik. Hal ini tidak jauh berbeda dengan negara Brazil, melalui fungsi audit pemerintah yang turut bekerjasama dengan lembaga hukum Pengadilan setempat telah membatasi adanya perencanaan pemerintah daerah terhadap pengeluaran jangka panjang, walupun disisi lain hal ini terkesan kaku dan membatasi otonomi perencanaan daerah, namun audit telah berfungsi sebagai katalisator reformasi keuangan publik (Grubnic and Cooper, 2019).

Mengacu pada berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan di sebagian negara yang berbeda, telah membuktikan bahwasanya keuntungan terhadap implementasi SDF terhubung dalam berbagai aspek pemerintah. Apabila diperhatikan dengan baik, kajian implementasi SDF justru berangkat

dari pengembangan berbagai literatur yang sangat rasional dan mampu memberikan berbagai pandangan dan sisi yang berbeda, sehingga konteks ini akan menjadi sumber inspirasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan praktik manajemen yang lebih baik kepada masyarakat. Lebih jauh fungsi literatur akan menambah referensi adanya berbagai praktik pemerintah daerah yang berdampak terhadap masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, budaya sampai kepada penggunaan teknologi. Seluruh kondisi ini jelas akan berdampak sangat signifikan bagi kemajuan sebuah daerah dan sudah dapat diyakini menjadi bentuk rekomendasi positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Menurut Dahan and Strawczynski (2020) dari kajian teori The concept of "budget centralization", "government effectiveness", "decentralization" dan konsep "state capacity" ditemukan bahwa negara-negara yang memiliki hubungan sentralisasi minimal dengan pemerintah pusat, faktanya memiliki kinerja yang jauh lebih baik di bidang kesehatan dan infrastruktur serta efektivitas yang sama dalam pengumpulan pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya kekuatan pemerintah daerah disaat mampu mengelola anggaran dengan baik dan menyadari fungsi desentralisasi sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja. Lebih jauh berdasarkan Theory of Fiscal Federalism, telah ditemukan adanya mobilisasi sumber daya yang sangat efektif oleh berbagai Kota di India sehingga proses konvergensi akan terjadi melalui pembangunan infrastruktur sosial yang berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi (Dave, 2020).

Sistem Desentralisasi Fiskal

Memahami arti dan fungsi desentralisasi secara utuh, akan memberikan wawasan yang lebih dinamis dalam menganalisis peran pemerintah daerah yang saat ini ada diberbagai negara. Mengacu pada sistem yang saat ini berjalan di Indonesia sebagai perbandingan yang aktual, harus dipahami atas dasar hukum yang berlaku sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan wewenang yang terjadi antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sudah berjalan dan fenomena ini telah mendorong terciptanya kinerja daerah yang ditujukan pada tingkat kemandirian yang lebih baik. Berbagai literatur yang mendasari pelaksanaan sistem SDF, telah banyak melahirkan dampak terhadap berbagai aspek terutama pada sisi kehidupan masyarakat yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah. Oleh krena itu dapat dipahami bahwa sejak berlakunya desentralisasi sampai saat ini, seluruh negara telah sepakat bahwa pengendalian daerah tetap penting sebagai bagian dari pencegahan meluasnya kesalahan tindakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

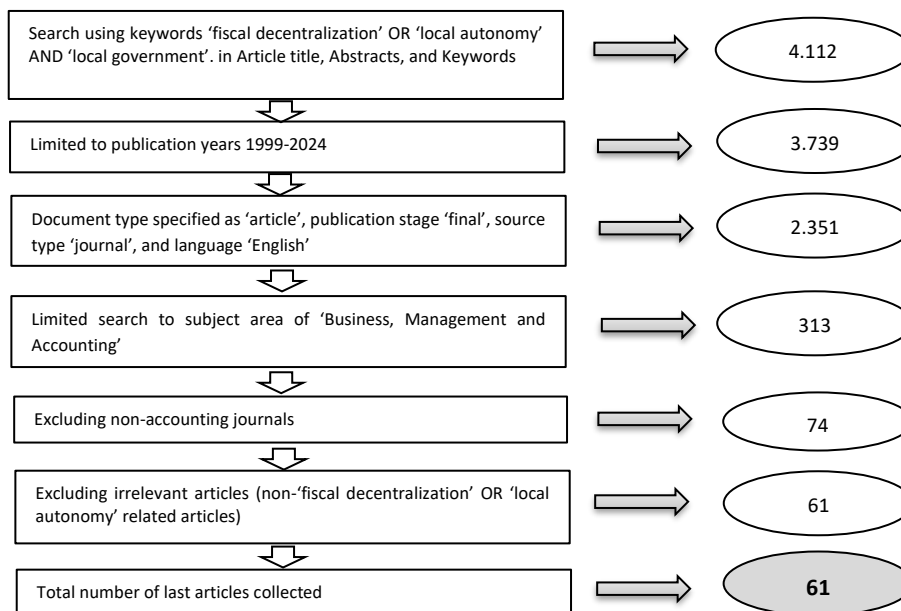
Definisi desentralisasi menurut (Dekhtyar et al., 2020) juga diartikan sebagai desentralisasi keuangan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya keuangan yang memadai bagi pemerintah daerah untuk menggunakan hak dan kekuasaan mereka yang diperluas, terkait dengan pengalihan sebagian fungsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas dalam mengelola anggaran sebagai basis untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu peran dan fungsi pemerintah daerah diperluas melalui kreativitas dan standar legalitas yang terukur agar dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah. Pengertian ini juga dihubungkan dengan Agency Theory yang mengandung makna bahwasanya pemerintah daerah memiliki hubungan kontraktual dengan pemerintah pusat yang tercermin dari berbagai kebijakan publik (Ratmono & Darsono, 2022). Antara pemerintah pusat dan daerah harus menjadi sumber sinergi kuat dalam implementasi anggaran yang ada di daerah. Pemerintah pusat sebagai pengendali harus mampu menunjukkan batasan-batasan peran yang mampu mendorong terwujudnya kebebasan bagi pemerintah daerah, sehingga penekanan pada tujuan kemandirian daerah dapat dicapai secara maksimal. Namun demikian, pemerintah pusat harus memperkuat fungsi pengawasan atau monitoring yang diciptakan secara terstruktur dengan melibatkan pihak audit sehingga akan mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang sehat.

Fakta lain yang terjadi di negara Jordania, bahwasanya pemerintah negara tersebut mengakui bahwa reformasi desentralisasi sangat membantu di dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut studi yang dilakukan oleh Aljaloudi (2020) melalui kajian Fiscal Federalism Theory dan Decentralization Theory mengungkapkan adanya kemajuan di bidang desentralisasi politik dan administratif yang tercermin dalam pembentukan dewan terpilih di tingkat nasional, regional, dan kota serta pengalihan sejumlah kekuasaan dari otoritas pusat ke badan-badan regional atau lokal. Kondisi ini jelas memberikan gambaran yang kuat kepada setiap negara yang

menginginkan adanya peningkatan nilai kekuasaan namun berdampak positif bagi pengembangan daerah. Melihat berbagai kasus yang terjadi, sangat beralasan apabila setiap negara harus menjadikan sistem SDF sebagai bagian dari kebutuhan negara, ditambah lagi dengan permasalahan luasnya demografi kekuasaan atau wilayah yang berdampak pada sulitnya monitoring dan pengawasan secara komprehensif. Disamping itu dapat diyakini secara pasti bahwa melalui adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah yang terjalin harmonis akan membantu dalam memprediksi kinerja anggaran menjadi lebih baik (Delewa, 2016).

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dengan basis data Scopus yang ditelusuri mulai tahun 1999-2024. Alasan penentuan jangka waktu tersebut adalah pasca lahirnya New Public Governance (NPG) pada tahun 2000, sehingga rujukan terhadap data yang diperoleh akan lebih kompleks dan mampu memberikan gambaran data yang lebih akurat dan dapat mengeneralisir kesimpulan dengan baik. Jumlah artikel yang direview sampai batas screening akhir adalah sebanyak 61 artikel. Untuk lebih jelas sumber perolehan data dimaksud, Gambar 1 berikut akan memberikan alur diagram penelusuran artikel secara sistematis.



Gambar 1. Alur Diagram Penelusuran Artikel
Sumber: Penulis (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan uraian metode SLR yang telah dibahas pada Gambar 1, maka penulis akan menguraikan seluruh ke dalam beberapa bagian untuk mengetahui aspek apa saja yang lebih dominan berlaku sepanjang tahun pengamatan. Melalui kajian secara sistematis, diharapkan hasil yang akan diperoleh dapat memberikan kontribusi serta implikasi positif dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam ranah sistem SDF.

HASIL

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif sebanyak 61 artikel meliputi beberapa ruang lingkup yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisis hasil dan kesimpulan artikel yang mampu memberikan gambaran kuat untuk membahas berbagai aspek terkait. Deskripsi terhadap proses awal kajian meliputi hal berikut:

a. Sumber publikasi

Sumber artikel menjadi kajian secara sistematis untuk menemukan sejumlah artikel yang dipublikasi pada data Scopus dengan basis atau ruang lingkup "Bisnis, Management and Accounting". Berdasarkan sumber publikasi, dapat dilihat Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sumber Publikasi Artikel

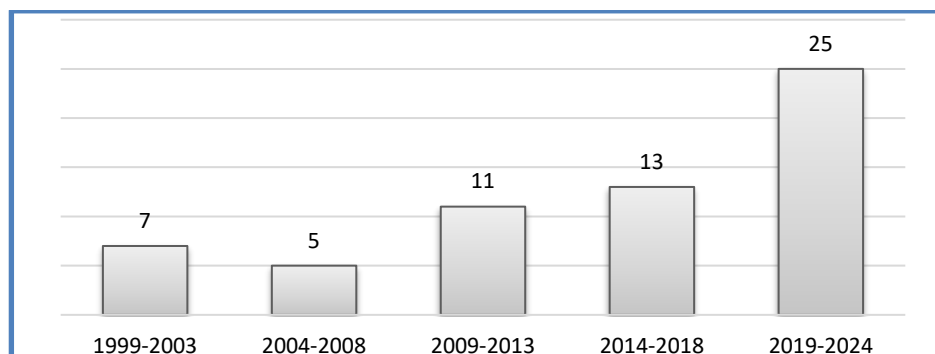
No.	Nama Jurnal	Jumlah
1	Public Management Review	4
2	Innovation: The European Journal of Social Science Research	1
3	Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management	4
4	International Journal of Public Administration	17
5	American Review of Public Administration	6
6	Review of Public Personnel Administration	1
7	Journal of International Business Studies	1
8	Governance	2
9	Public Administration Review	2
10	Fiscal Studies	3
11	Journal of Accounting & Organizational Change	1
12	Public and Municipal Finance	2
13	Public Money and Management	1
14	Records Management Journal	1
15	Hitotsubashi Journal of Economics	4
16	Review of Public Personnel Administration	1
17	European Accounting Review	1
18	International Journal of Public Policy and Administration Research	2
19	China Journal of Accounting Research	1
20	Journal of Accounting and Organizational Change	1
21	Journal of Governance and Regulation	2
22	China Journal of Accounting Studies	1
23	Financial Accountability and Management	1
24	Universal Journal of Accounting and Finance	1
		61

Sumber: Penulis (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwasanya jumlah publikasi terbanyak ada pada Internasional Journal of Public Administration dengan jumlah publikasi sebanyak 17 publikasi atau sekitar 28%, sedangkan berikutnya disusul oleh American Review of Public Administration atau sekitar 10%. Dari nama sumber publikasi dapat disimpulkan bahwasanya topik SDF dalam 2 (dua) dekade terakhir telah banyak diminati oleh peneliti untuk membahas bagaimana pengaruh desentralisasi pada pemerintah daerah.

b. Periode publikasi

Mengacu pada periode publikasi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



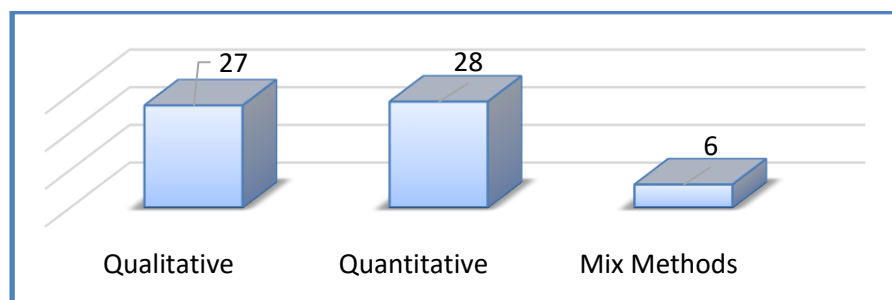
Gambar 2. Periode Publikasi

Sumber: Penulis (Data Diolah, 2024)

Gambar 2 menjelaskan artikel berdasarkan tahun terbit, dimana dapat dilihat peminat peneliti sangat masih tergolong rendah memasuki akhir periode pertama, dimana hanya terdapat 12 publikasi. Sedangkan tren penelitian dengan topik SDF terus meningkat memasuki periode kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa topik SDF masih membutuhkan banyak perubahan dan pengembangan khususnya dalam tubuh pemerintah daerah.

c. Jenis penelitian

Salah satu hal yang paling diminati oleh peneliti adalah keputusan terhadap jenis penelitian yang akan memperlihatkan validitas dan penentuan kesimpulan sehingga menentukan sumber data yang akan digunakan dalam interpretasi hasil penelitian. Gambar 3 akan memperlihatkan jenis penelitian yang umumnya dilakukan untuk topik SDF sebagai berikut:



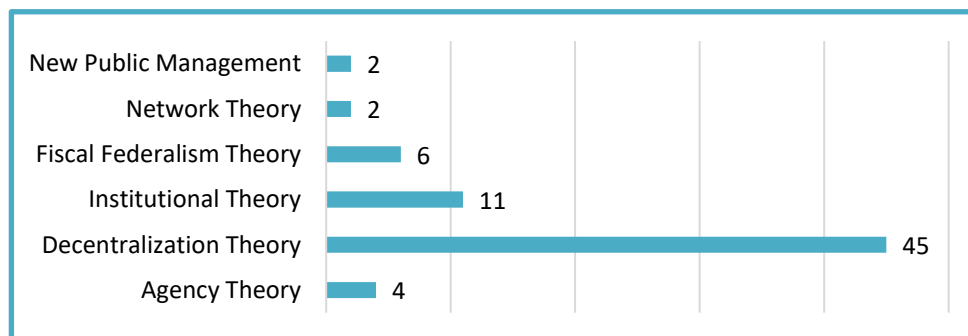
Gambar 3. Jenis Penelitian

Sumber: Penulis (Data Diolah, 2024)

Secara umum ketertarikan peneliti hampir seimbang antara metode kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa minat peneliti dalam menganalisis hasil penelitian untuk topik SDF sangat fleksibel karena metode yang digunakan dianggap tidak akan memberikan hasil yang jauh berbeda, sepanjang sumber data yang digunakan tergolong sebagai informasi yang umumnya tidak sulit diperoleh.

d. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis menjadi dasar yang sangat kuat dan penting dalam menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi pada topik SDF. Melalui kerangka teoritis yang tepat, maka solusi permasalahan dapat terjawab dengan baik dan tepat sehingga arah pembahasan dengan sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang beragam dan mudah untuk dikembangkan. Gambar 4 berikut akan memperlihatkan kerangka teoritis yang umum digunakan oleh peneliti.



Gambar 4. Dominasi Kerangka Teoritis

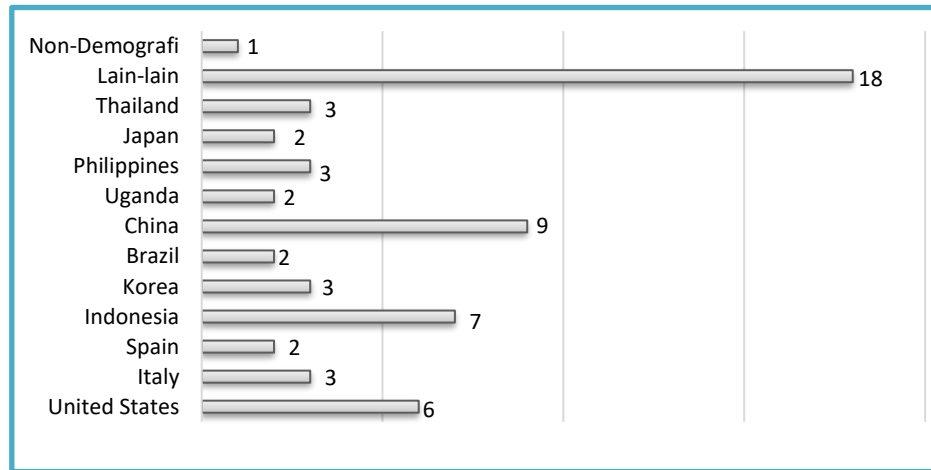
Sumber: Penulis (Data Diolah, 2024)

Informasi Gambar 4 jelas terlihat bahwa topik SDF sangat sesuai dihubungkan dengan kerangka teori desentralisasi, namun teori yang lain akan memperkaya khasanah sudut pandang peneliti

dalam menghasilkan beragam kesimpulan. Apabila dilihat dari berbagai aspek yang saling terhubung maka jenis teori yang berbeda akan lebih tepat dikaji melalui sudut pandang teori yang lebih sesuai.

e. Demografi/Negara

Gambar 5 berikut akan memperlihatkan beragam negara yang telah diteliti dengan topik SDF:



Gambar 5. Demographi/Negara
Sumber: Penulis (Data Diolah, 2024)

Penelitian yang dilakukan diberbagai negara didunia selama 2 (dua) dekade terakhir sejak lahirnya New Public Governance (NPG) telah memberikan pandangan yang berbeda akan adanya kultur, politik, sosial maupun tingkat keyakinan publik. Dari Gambar 5 di atas dapat diketahui bahwa negara China yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak didunia serta sistem kenegaraan yang tergolong kaku dan berbasis komunisme, ternyata telah menarik minat peneliti untuk mendalami lebih lanjut tentang adopsi SDF yang dilihat dari berbagai aspek. Selanjutnya disusul oleh Indonesia yang juga merupakan salah satu negara terbesar dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, dan permasalahan daerah yang sangat luas. Dari 2 (dua) negara ini dapat disimpulkan bahwa topik SDF akan terus mengalami reformasi secara berkelanjutan melalui berbagai kebijakan yang mampu mendorong lahirnya prosedur ataupun metode yang lebih inovatif.

Multi Aspek Sistem Desentralisasi Fiskal

Dari hasil penelusuran sebanyak 61 artikel, dapat dijelaskan beberapa aspek yang dipengaruhi oleh sistem desentralisasi yang menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu baik secara praktis maupun akademis, sehingga wawasan menyangkut SDF pada pemerintah daerah akan menjadi bagian yang terus dikembangkan. Hal-hal menyangkut aspek temuan dari pembahasan artikel dapat dibagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- Tata Kelola Administrasi Daerah;** aspek ini akan menjelaskan bagaimana tata kelola pemerintah daerah setelah berjalannya sistem SDF yang menjadi rujukan setiap negara untuk mereformasi sistem administrasi yang lebih efektif dan efisien.
- Tata Kelola Keuangan;** dalam tata kelola keuangan, pengaruh desentralisasi sangat signifikan yang menyebabkan berbagai permasalahan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas.
- Pelayanan Publik;** memberikan pengetahuan baru yang sangat dinamis terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pelayanan publik yang berdampak bagi kinerja pemerintah daerah dan sangat mempengaruhi image masyarakat.
- Interkoneksi Pemerintah Pusat dan Daerah;** aspek ini akan memberikan input bagi pemerintah daerah dalam rangka mencapai tingkat kemandirian dengan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (hubungan pemerintah pusat dan daerah).

Mengacu pada 4 (empat) aspek yang telah diuraikan di atas, maka peran pemerintah daerah akan

sangat terlihat jelas dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pengembangan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Tata Kelola Administrasi Daerah

Pengaruh tata kelola administrasi daerah sangat menentukan berjalannya sistem SDF yang bermuara pada kinerja pemerintah daerah. Secara umum tata kelola administrasi sangat luas dan terkait langsung dengan implementasi SDF yang telah diadopsi oleh pemerintah daerah serta mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah secara dinamis. Secara umum peneliti mengungkapkan hasil yang hampir serupa dalam pengelolaan sistem SDF, dimana pengaruh terhadap aspek positif maupun negatif yang terjadi dapat dipahami dan memberikan pandangan yang utuh terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Permasalahan seperti politik, administratif, fiskal, pengembangan SDM sampai kepada penggunaan teknologi merupakan bagian penting yang dipengaruhi oleh adanya sistem SDF.

Teori evolusi ketergantungan yang digunakan oleh Awortwi (2010) telah menemukan bahwa negara Ghana dan Uganda tetap bertahan untuk mengembalikan sistem desentralisasi karena hanya menguntungkan politisi dan birokrat pemerintah pusat yang dianggap akan menghambat berjalannya kemandirian daerah. Berbeda di Thailand, dimana justru pemerintah daerah sangat konsentrasi dengan melakukan reformasi sistem administrasi kepegawaian daerah yang mampu menciptakan SDM yang kompeten melalui rekrutmen pegawai (Rohitarachoon and Hossain, 2012). Selanjutnya penelitian yang lain oleh Jun and Bryer (2016) juga menemukan bahwa kompleksitas organisasi pemerintahan daerah berdampak positif dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan menyediakan sumber daya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa keterlibatan masyarakat dapat mengendalikan pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran, sehingga perlunya mencapai keseimbangan yang tepat antara tanggung jawab fiskal dan efektivitas pemerintah (Dahan and Strawczynski, 2020).

Disamping permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sejauh ini sistem desentralisasi juga mempengaruhi inovasi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berbagai tindakan pemerintah daerah, termasuk adanya inovasi secara demokratis telah melahirkan amandemen terhadap lahirnya dokumen konstitusi daerah (Trettel, 2021). Tidak sampai disitu, lebih jauh pengaruh SDF juga telah membantu pemerintah daerah dalam mengatur struktur vertikal administrasi perpajakan (Martinez-vazquez & Timofeev, 2010) dimana wewenang secara horizontal telah membentuk fungsi pajak untuk mengendalikan pendapatan daerah. Secara keseluruhan perubahan sistem administrasi pemerintahan yang diakibatkan oleh adanya SDF, telah mengubah kebijakan publik yang lebih selaras dengan preferensi lokal dan sesuai dengan berbagai pilihan pemerintah daerah melalui arsitektur fiskal yang berkembang, walaupun disisi lain terkadang masih terdapat kelemahan dari dana yang tersedia (Cyan, 2007).

Dari berbagai hasil temuan peneliti di atas, masih terdapat banyak aspek tata kelola administrasi daerah yang menyangkut reformasi kompetensi sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme administrasi, hubungan kemitraan, tingkat kesejahteraan pegawai, tingkat kepuasan kerja serta akuntabilitas maupun politisasi ((Fimreite and Læg Reid, 2009); (Bergh, 2010); (Gordon, 2011); (Pallangyo & Rees, 2010); (Martell, 2007)). Keseluruhan aspek tersebut telah menciptakan tantangan tersendiri bagi pengembangan sistem SDF ke arah yang lebih inovatif dan mampu memberikan value added bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran daerah untuk mewujudkan tata kelola yang lebih sehat dan bersih.

Tata Kelola Keuangan

Keberhasilan implementasi sistem desentralisasi fiskal dan tata kelola pemerintah daerah salah satunya dapat diukur dari keberhasilan keuangan serta dampak terhadap kebijakan moneter daerah (Pan et al., 2020) dimana standar ukurannya adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Menurut Boex dan Simatupang (2008) ukuran desentralisasi fiskal dapat dilihat dari pemberdayaan masyarakat yang tercermin dari pemberdayaan pemerintah daerah. Penerapan metode yang diusulkan oleh pemerintah daerah memungkinkan publik untuk menilai tingkat desentralisasi keuangan anggaran daerah dalam rangka menentukan tingkat otonomi keuangan dan kemandirian keuangan daerah (Dekhtyar et al., 2020). Salah satu standar pengelolaan yang sukses oleh

pemerintah daerah adalah melalui adanya transfer dana dari pemerintah pusat untuk kebutuhan daerah, yang digunakan untuk belanja modal, karena penggunaan dana ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan infrastruktur ((Kook, 2000); (Ma & Mao, 2018)) yang sesuai dengan tujuan reformasi SDF untuk mengubah perekonomian terencana menjadi perekonomian yang lebih berorientasi pasar (Bourmistrov & Mellempvik, 2010). Dana transfer yang mencerminkan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, harus dapat didesain dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan membantu memperluas validitas eksternal daerah (Krueathep, 2010). Oleh karena itu sikap ketergantungan dari pemerintah pusat tidak harus menciptakan kinerja pemerintah daerah menjadi berkurang, justru ketergantungan tersebut menunjukkan bukti adanya keselarasan hubungan antara laporan yang disajikan (bottom-up) dengan yang dibutuhkan (top-down) untuk saling memperkuat pengendalian (Caruana & Zammit, 2019), karena pemantauan administratif terhadap pemerintah daerah sangat penting dalam memperbaiki penyalahgunaan dana publik (L. Li et al., 2019). Lebih jauh lagi dapat dilihat bahwa keberhasilan daerah di Tiongkok dapat diukur dari pemberian insentif fiskal oleh pemerintah pusat ((Ping, 2000); (Yamada, 2016)) dan hal ini menjadi salah satu bentuk ukuran keberhasilan pemerintah daerah.

Berbeda dengan kasus di Jepang dimana sistem yang dibangun atas dasar desentralisasi telah mengakibatkan kekhawatiran akan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat (Yamada, 2016). Demikian juga kasus yang terjadi di Amerika Serikat yang dialami oleh 150 negara bagian dengan kondisi melemahnya keuangan akibat dari adanya sistem desentralisasi (Stone, 2015). Sedangkan di Indonesia desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Din et al., 2022) yang artinya bahwa tingkat kecurangan berpengaruh terhadap kesehatan fiskal pemerintah daerah. Pro dan kontra terhadap tata kelola yang dipengaruhi oleh adanya SDF, akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengkritisi manfaat yang diberikan, walaupun dilain sisi adopsi sistem pelaporan maupun penganggaran telah memperkuat transparansi laporan otoritas pemerintah daerah (Harun et al., 2020). Apabila dilihat dari teori desentralisasi, maka tujuan pengelolaan keuangan sangat jelas ditujukan lebih kepada bagaimana pemerintah daerah mampu mencapai tingkat transparansi fiskal yang mencerminkan adanya keterbukaan informasi bagi publik, sehingga diantaranya dapat menciptakan persaingan politik, akuntabilitas ekonomi dan administratif yang lebih baik dan meningkatnya kualitas desentralisasi bagi daerah ((Esteller-moré and Otero, 2012); (Martell, 2007)). Oleh karena itu pemerintah harus mampu mengatur dengan baik seluruh sisi keuangan melalui perencanaan sampai kepada pelaporan program yang mendorong kinerja keuangan pemerintah. Dengan kata lain, Caruana & Zammit (2019) menemukan bahwa penyelarasan pelaporan yang diperlukan (top-down) dan pelaporan yang disajikan (bottom-up), harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ukuran keberhasilan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh keberhasilan fungsi audit pemerintahan, dimana melalui rekomendasi auditor, sistem keuangan akan terus berkembang dan memiliki sistem yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit dapat dianggap sebagai katalisator yang potensial dalam menunjang data keuangan pemerintah daerah, namun menurut (Lino et al., 2023) hal ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena pendorong dan motivasi organisasi yang mensponsori reformasi pengelolaan keuangan publik sangat penting bagi efektivitas reformasi secara keseluruhan. Dengan demikian keberadaan audit tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa namun lebih kepada pemberi rekomendasi dalam melakukan perbaikan dan pengembangan organisasi. Pemerintah daerah wajib mengedepankan integritas yang tinggi dalam memperoleh kepercayaan publik sehingga nilai organisasi pemerintah akan semakin berharga melalui pembuktian tingkat kejujuran dalam menggunakan anggaran. Menurut (Aswar et al., 2022) desentralisasi fiskal, ukuran pemerintahan, dan temuan audit mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan tingkat korupsi. Penelitian tersebut juga memberikan kontribusi terhadap praktik audit, administrasi pemerintahan, penegakan hukum, dan inisiatif pengendalian korupsi di pemerintah daerah Indonesia, termasuk kontribusi dana pemerintah daerah terhadap partai politik, yang harus diawasi untuk menghindari adanya kesenjangan politik (Taplin et al., 2013). Apabila pemerintah mampu memberikan tingkat keyakinan yang cukup kuat terhadap penggunaan anggaran, maka sistem SDF akan menuju pada keberlanjutan sistem yang lebih unggul dan bersih, serta rekomendasi audit menjadi supporter dalam pengelolaan anggaran.

Pelayanan Publik

Menilik salah satu aspek yang paling penting dan tidak akan pernah berhenti adalah menyangkut pelayanan publik yang meliputi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Pelayanan publik yang baik mencerminkan pemerintah daerah yang baik, sehingga akan terhindar dari kesenjangan fiskal yang menimbulkan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap pelayanan yang dapat diberikan (Zhao, 2009). Salah satu keuntungan berlakunya sistem SDF, pemerintah daerah mampu mengatur sejauh apa pelayanan yang dapat diberikan kepada publik, termasuk penyediaan anggaran secara “top-down” walaupun disisi lain pemerintah daerah belum mampu meningkatkan tingkat pendapatan daerah (Rao, 2000). Melalui berbagai bentuk perhatian pemerintah seperti pelayanan kesehatan (Grubnic & Cooper, 2019), dana pendidikan (Turati et al., 2016), teknologi informasi (Gesuele, 2016) maupun pelayanan sosial lainnya akan berdampak langsung pada kinerja pemerintah dan hal ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengukur keberhasilan daerah, disamping juga mempertimbangkan struktur administratif ditingkat lokal maupun regional (H. Li et al., 2016). Sistem pelayanan publik yang efektif mampu menciptakan kepuasan dan mendorong meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus memikirkan berbagai inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Inovasi pelayanan publik menjadi sebuah tuntutan yang sangat responsif saat ini. Menurut Gesuele (2016) bahwa teknologi informasi dan komunikasi baru mengubah hubungan antara pemerintah kota dan warganya. Melalui pendekatan "arsip terintegrasi" oleh pemerintah daerah sangat dianjurkan untuk mengantisipasi praktik terbaik dalam pelestarian arsip jangka panjang (Maroye & Hooland, 2017). Artinya pemerintah daerah harus siap dengan pelayanan publik berbasis teknologi yang dapat memberikan tingkat pelayanan yang tepat dan cepat, karena menurut (Harun et al., 2020) implementasi teknologi akuntansi baru harus mempertimbangkan kapasitas kelembagaan organisasi sektor publik dan bagaimana teknologi baru tersebut menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya standar pelayanan yang memadai sehingga akan mendorong kualitas berpikir masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat membutuhkan keadilan dan inklusivitas yang tinggi sebagai warga negara, karena hak dan kewajiban pemerintah menjadi prioritas untuk dapat dinikmati sebagai bagian dari milik masyarakat. Kemajuan informasi teknologi dalam pelayanan publik yang dikaji melalui inovasi model manajemen dapat meningkatkan karakteristik pemerintah daerah yang meliputi (1) kepemimpinan inovatif; (2) regulasi dan kebijakan; (3) kualitas tenaga kerja; (4) struktur organisasi; dan (5) jaringan eksternal (Santoso et al., 2023). Oleh karena itu pengaruh desentralisasi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (seperti terciptanya mekanisme akuntabilitas dalam penyediaan layanan pendidikan (Turati et al., 2016), akuntabilitas demokratis dalam pelayanan kesehatan (Grubnic & Cooper, 2019)). Dengan demikian hal ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dan menjadi bagian dari tatanan budaya yang lebih bermartabat.

Interkoneksi Pemerintah Pusat dan Daerah

Prinsip dasar penerapan teori desentralisasi adalah terjadinya hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diperkuat oleh teori federalisme keagenan dan fiskal yang juga mensyaratkan bahwa hubungan keduanya dapat dilihat dari dasar pelaporan anggaran dan keuangan yang digunakan (Caruana & Zammit, 2019). Kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai penanggungjawab dalam lingkup masing-masing wilayah serta menjadi role model dalam memenuhi standar kebutuhan bagi masyarakat. Adanya berbagai kepentingan masyarakat telah mengakibatkan terjadinya difusi vertikal suatu kebijakan yang bergantung pada kapasitas fiskal dan kapasitas personel pemerintah daerah, sehingga menimbulkan otonomi kelembagaan yang kuat di tingkat lokal (Kim et al., 2016), disamping harus melihat juga adanya pembatasan otonomi fiskal yang berhubungan dengan pembentukan daerah baru (Goodman & Leland, 2019). Di lain sisi diketahui bahwa di Jepang tingkat investasi perusahaan asing sangat tinggi terhadap daerah-daerah yang memiliki sistem desentralisasi yang baik melalui adanya akses informasi lokal dan kemampuan politik (Hu et al., 2021). Dengan demikian peran pemerintah daerah menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan SDF yang efektif dan efisien.

Adanya hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah mampu memprediksi kinerja

anggaran (Delewa, 2016) serta dapat menciptakan sikap kolaboratif dan tingkat kepuasan terhadap hubungan fiskal yang akan berdampak positif pada kolaborasi antar pemerintah di seluruh tingkat pemerintahan (Chung and Choi, 2021), termasuk internalisasi sistem pelaporan dan anggaran yang juga merupakan respon atas kewajiban hukum yang dikenakan oleh pemerintah pusat (Harun et al., 2020). Efek-efek tersebut akan berdampak positif bagi keberlanjutan penerapan sistem SDF dengan syarat adanya perubahan yang terus menerus dilakukan oleh kedua belah pihak. Sikap saling ketergantungan pada dasarnya tidak akan menyebabkan efek negatif apabila kebijakan yang ditetapkan tidak saling berbenturan dan tumpang tindih satu sama lain karena gesekan baik secara vertikal maupun horizontal mudah terjadi dalam konteks kepentingan tertentu. Menurut Cain, Gerber, and Hui (2020) dalam teori administrasi publik menunjukkan bahwa elemen inti dalam kolaborasi yang sukses adalah memberdayakan para pemimpin lokal yang mempunyai tujuan yang sama dengan kolaborasi tersebut, serta memberikan keleluasaan yang luas untuk mengambil keputusan penting dalam mengatur komunitas di daerah (Legaspi, 2001). Namun, konsensus politik terhadap otonomi daerah yang diperlukan untuk mewujudkan kolaborasi yang dihasilkan oleh pihak eksternal dapat menghambat keberhasilan kedua belah pihak. Oleh karena itu aspek politik harus menjadi pertimbangan khusus dalam pengelolaan SDF agar keseimbangan tidak bergeser dari kerangka kolaboratif yang sudah dibangun.

Mengingat pentingnya hubungan yang terjadi antara pemerintah daerah dan pusat, maka dibutuhkan berbagai usaha yang maksimal untuk membangun dan menciptakan harmonisasi baik dalam kebijakan maupun tindakan. Hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah ini, telah dibuktikan oleh negara Tiongkok dengan adanya sistem bagi hasil (ditetapkan pada tahun 1994) yang mengatur sentralisasi pendapatan, desentralisasi belanja, dan transfer pusat yang besar ke pemerintah daerah (Guang, 2018). Menurut Turner (2007) meskipun pemerintah pusat telah mendelegasikan wewenangnya kepada wilayah subnasional, mereka masih melakukan kontrol melalui fiskal dan cara lainnya. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah pusat agar kendali negara tetap terjaga dengan baik. Namun hal tersebut sangat diharapkan tidak akan menimbulkan masalah seperti (a) tidak akan terjadi pembatasan akses terhadap sumber daya keuangan yang stabil; (b) kinerja perekonomian nasional yang tidak stabil; (c) kendali pemerintah yang terpusat; (d) hasil desentralisasi yang beragam; (e) kelemahan kelembagaan serta manajerial; dan (f) termasuk korupsi dalam pengumpulan dan penggunaan sumber daya (Chapman et al., 2003).

Misalnya di Indonesia menurut Brodjonegoro and Asanuma (2016) hubungan tersebut justru harus ditinjau ulang karena 3 (tiga) hal substansial yaitu (a) masih lemahnya administrasi, manajerial dan perencanaan daerah, (b) secara umum masih rendahnya pendapatan daerah, (c) masih diperlukannya transfer fiskal dalam skala besar, yang akan membebani anggaran pemerintah pusat. Relevansi kebutuhan kedua belah pihak juga menjadi pertimbangan secara terukur untuk dijadikan dasar dalam pengambilan berbagai keputusan, termasuk pertimbangan karakteristik individu pengelola daerah yang merupakan komponen integral dari “permainan” antara pemerintah pusat dan daerah dalam distribusi transfer antar pemerintah (Kim and Oh, 2016). Akhirnya pengaruh SDF yang terjadi dalam lingkup pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meraih maksimalisasi kesejahteraan publik.

KESIMPULAN

Implementasi SDF diberbagai pemerintahan negara di dunia, pada umumnya telah mempengaruhi adanya tingkat stabilitas yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung. Reformasi yang terjadi selama ini telah memberikan perubahan yang sangat signifikan pada berbagai aspek penting yang dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya. Sasaran kemandirian daerah menjadi semakin penting akibat adanya pemahaman yang komprehensif terhadap peran dan fungsi SDF. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin baik hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah, maka akan semakin harmonis dalam menetapkan berbagai kebijakan publik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Aspek-aspek penting yang sangat dominan dalam tatanan pemerintahan daerah seperti tata kelola administrasi, tata kelola keuangan, pelayanan publik serta interkoneksi hubungan antar pemerintah, pada prinsipnya telah mampu mengubah sebagian besar pemahaman masyarakat terhadap sistem desentralisasi yang dianggap sangat dinamis dan memungkinkan untuk terus berkembang dan merensentralisasi wewenang pemerintah daerah. Secara faktual, faktor politik

telah membuktikan bahwa desentralisasi yang menggambarkan “kebebasan” pada prinsipnya masih dikendalikan sebagian besar oleh pemerintah pusat sebagai dalih upaya untuk menjaga kestabilan dari kelemahan dan permasalahan daerah. Namun demikian batas kekuasaan pemerintah daerah selama 2 (dua) dekade terakhir telah menjadi satu konsensus yang kuat dan patut diperhitungkan.

Keterbatasan penelitian ini adalah mengkaji hasil penelitian dengan data yang bersumber dari satu database, dan analisis hasil dikaji masih bersifat generalistik. Untuk isu penelitian selanjutnya, masih memungkinkan mendalami permasalahan terkait faktor politik dan karakteristik antar organisasi pemerintah yang dihubungkan dengan praktik desentralisasi yang sangat dinamis dan kontroversial. Kajian kerangka teoritis juga menjadi rekomendasi berikutnya untuk dijadikan topik yang lebih menarik dan spesifik, disamping perluasan kajian terhadap penggunaan teoritis yang koheren dengan SDF.

REFERENSI

- Aljaloudi, J. (2020). Fiscal decentralization in Jordan. *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 37–46. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i4art3>
- Aswar, K., Sumardjo, M., & Nopiyanti, A. (2022). The Role of Law Enforcement on Moderating the Relationship between Government Size , Fiscal Decentralization , Audit Finding and Corruption. *UNiversal Journal of Accounting and Finance*, 10(31), 211–218. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100122>
- Awortwi, N. (2010). The Past , Present , and Future of Decentralisation in Africa : A Comparative Case Study of Local Government Development Trajectories of Ghana and Uganda The Past , Present , and Future of Decentralisation in Africa : A Comparative Case Study of Local Gov. *International Journal of Public Administration*, October 2014, 37–41. <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.514451>
- Bergh, S. I. (2010). Assessing the Scope for Partnerships Between Local Governments and Community-Based Organizations : Findings from Rural Morocco Assessing the Scope for Partnerships Between Local Governments and Community-Based Organizations : Findings from Rural Morocco. *International Journal of Public Administration*, 33, 740–751. <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.513358>
- Boex, J., & Simatupang, R. R. (2008). Fiscal Decentralisation and Empowerment : Evolving Concepts and Alternative Measures *. *Fiscal Studies*, 29(4), 435–465.
- Bourmistrov, A. L., & Mellemvik, F. (2010). European Accounting Review Russian local governmental reforms: autonomy for accounting development? *European Accounting Review*, 8(4), 675–700. <https://doi.org/10.1080/096381899335763>
- Brodjonegoro, B., & Asanuma, S. (2016). Regional Autonomy and Fisca; Decentralization In Democratic Indonesia. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 41(2), 111–122.
- Cain, B. E., Gerber, E. R., & Hui, I. (2020). The Challenge of Externally Generated Collaborative Governance : California ’ s Attempt at Regional Water Management. *American Review of Public Administration*, 1–10. <https://doi.org/10.1177/0275074020908578>
- Caruana, J., & Zammit, K. (2019). Losing Control: The Gap in Multi-Level Government Reporting. *Journal of Public Budgeting , Accounting and Financial Management*, 31(2), 264–284.
- Chapman, J., Gakuru, P., & Klerk, G. De. (2003). Local Fiscal Stress in Sub - Saharan Africa : The Kenyan Example. *International Journal of Public Administration*, 26(13), 1519–1550. <https://doi.org/10.1081/PAD-120024408>
- Chung, J. W., & Choi, Y. (2021). What Influences Collaborative Relationships between Central and Local Governments? Empirical Evidence from South Korea What Influences Collaborative Relationships between Central and Local. *International Journal of Public Administration*, 00(00), 1–11. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1917610>
- Cyan, M. R. (2007). Fiscal Architecture-A Fetter on New Local Governments in Pakistan? *International Journal of Public Administration*, 30(December), 1459–1483. <https://doi.org/10.1080/01900690701229665>
- Dahan, M., & Strawczynski, M. (2020). Budget institutions and government effectiveness. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(2), 217–246. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2019-0055>
- Dave, F. (2020). Municipal finance analysis : The case study of Gujarat (India). *Public and*

- Municipal Finance*, 9(1), 70–87. [https://doi.org/10.21511/pmf.09\(1\).2020.07](https://doi.org/10.21511/pmf.09(1).2020.07)
- Dekhtyar, N., Valaskova, K., Deyneka, O., & Pihul, N. (2020). Assessment of the level of local budget financial decentralization : case of Ukraine. *Public and Municipal Finance*, 9(1), 34–47. [https://doi.org/10.21511/pmf.09\(1\).2020.04](https://doi.org/10.21511/pmf.09(1).2020.04)
- Delewa, P. O. (2016). Central government patronage, donor aid, and budget performance in local government: testing a mediation effect. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 28(2), 139–170.
- Din, M., Munawarah, M., Ghozali, I., Achmad, T., & Karim, F. (2022). Governance of Financial Management and Regulation Based Fiscal Accountability. *Journal of Governance and Regulation*, 11(2), 116–123. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art10>
- Esteller-moré, A., & Otero, J. P. (2012). Fiscal Transparency: (Why) does your local government respond? *Public Management Review*, 14(8), 37–41. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.657839>
- Fimreite, A. L., & Lægreid, P. (2009). Reorganizing the welfare state administration. *Public Management Review*, 11(3), 281–297. <https://doi.org/10.1080/14719030902798198>
- Gesuele, B. (2016). Municipalities and Facebook Use : Which Key Drivers ? Empirical Evidence from Italian Municipalities. *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1034323>
- Gilley, B., & Laochankham, S. (2024). Can Fiscal Recentralization Strengthen Local Government ? The Case of Thailand. *International Journal of Public Administration*, 47(4), 257–268. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2111580>
- Goodman, C. B., & Leland, S. M. (2019). Do Cities and Counties Attempt to Circumvent Changes in Their Autonomy by Creating Special Districts? *American Review of Public Administration*, 49(2), 203–217. <https://doi.org/10.1177/0275074018804665>
- Gordon, V. (2011). Exploring the Job Satisfaction of Municipal Clerks. *Review of Public Personnel Administration*, 31(2), 190–208. <https://doi.org/10.1177/0734371X11408570>
- Grossi, G., & Argento, D. (2022). The fate of accounting for public governance development. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(9), 272–303. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2020-5001>
- Grubnic, S., & Cooper, S. (2019). Enhancing democratic accountability in health and social care : The role of reform and performance information in Health and Wellbeing Boards. *Financial Accountability & Management*, (August 2019), 353–372. <https://doi.org/10.1111/faam.12216>
- Guang, Z. (2018). The revolutions in China ’ s inter- governmental fiscal system. *Public Money & Management*, 38(6), 419–426. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1486104>
- Harun, H., Carter, D., Mollik, A. T., & An, Y. (2020). Understanding the forces and critical features of a new reporting and budgeting system adoption by Indonesian local government. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(1), 145–167. <https://doi.org/10.1108/JAOC-10-2019-0105>
- Hu, T., Natarajan, S., & Delios, A. (2021). Sister cities , cross-national FDI , and the subnational FDI location decision. *Journal of International Business Studies*, 52(7), 1279–1301. <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00409-2>
- Jun, K., & Bryer, T. (2016). Facilitating Public Participation in Local Governments in Hard Times. *American Review of Public Administration*, 1–24. <https://doi.org/10.1177/0275074016643587>
- Kim, J., Iii, B. D. M., & Lee, J. (2016). The Nexus of State and Local Capacity in Vertical Policy Diffusion. *American Review of Public Administration*, 1–18. <https://doi.org/10.1177/0275074016675966>
- Kim, J., & Oh, S. S. (2016). Local Managerial Strategies for External Versus Own Source Fiscal Resources : Do Administrators ’ Previous Career and Education. *American Review of Public Administration*, 48(1), 28–50. <https://doi.org/10.1177/0275074014526637>
- Kook, J. H. (2000). Intergovernmental Fiscal Relationship and Transfers In Korea. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 41(2), 137–151.
- Krueathep, W. (2010). Measuring Municipal Fiscal Condition : The Application of U . S . -Based Measures to the Context of Thailand. *International Journal of Public Administration*, 33,

- 223–239. <https://doi.org/10.1080/01900690903405550>
- Legaspi, P. E. (2001). *The Changing Role of Local Government Under A Decentralized State: The Case of Philippines*. 3(1), 131–139. <https://doi.org/10.1080/14616670010009405>
- Li, H., Wang, Q., & Zheng, C. (2016). Interjurisdictional Competition and Intracity Fiscal Disparity across Chinese Prefectural Cities. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 00(Special Issue). <https://doi.org/10.1111/gove.12222>
- Li, L., Pang, B., & Wu, Y. (2019). Isolated counties , administrative monitoring , and the misuse of public funds in China. *Governance*, 1–19. <https://doi.org/10.1111/gove.12412>
- Lino, A. F., Azevedo, R. R. de, & Belote, G. S. (2023). The influence of public sector audit digitalisation on local government budget planning: evidence from Brazil. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(2), 1–22.
- Ma, G., & Mao, J. (2018). Fiscal Decentralization and Local Economic Growth : Evidence from a Fiscal Reform in China. *Fiscal Studies*, 39(1). <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2017.12148>
- Maroye, L., & Hooland, S. Van. (2017). Managing electronic records across organizational boundaries: The experience of the Belgian federal government in automating investigation processes. *Records Management Journal*, 27(1), 69–83.
- Martell, C. R. (2007). Municipal Government Accountability in Brazil. *International Journal of Public Administration*, 30, 1591–1619. <https://doi.org/10.1080/01900690701331495>
- Martinez-vazquez, J., & Timofeev, A. (2010). Choosing between Centralized and Decentralized Models of Tax Administration. *International Journal of Public Administration*, 33, 601–619. <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.514467>
- Mccabe, B. C., Reddick, C. G., & Demir, T. (2016). Municipal Professionalism : More Than Just a Job in Government? *American Review of Public Administration*, 1–19. <https://doi.org/10.1177/0275074016646872>
- Meer, J. Van Der, Vermeeren, B., & Steijn, B. (2024). Wellbeing During a Crisis : A Longitudinal Study of Local Government Civil Servants. *Review of Public Personnel Administration*, 44(1), 32–59. <https://doi.org/10.1177/0734371X221084104>
- Pallangyo, W., & Rees, C. J. (2010). Local Government Reform Programs and Human Resource Capacity Building in Africa : Evidence from Local Government Authorities (LGAs) in Tanzania. *International Journal of Public Administration*, 33, 728–739. <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.514714>
- Pan, J., Yu, Y., Wang, L., & Jing, X. (2020). Monetary policy , differences among issuing agencies , and the pricing of local government bonds. *China Journal of Accounting Studies*, 00(00), 1–18. <https://doi.org/10.1080/21697213.2019.1748837>
- Panao, R. A. L. (2020). Beyond Flypaper : Unconditional Transfers and Local Revenue Generation in the Philippines , 1992 – 2016 Beyond Flypaper : Unconditional Transfers and Local Revenue Generation in the. *International Journal of Public Administration*, 00(00), 1–14. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1759628>
- Ping, X.-Q. (2000). The Evolution of Chinese Fiscal Decentralization and The Impact of Tax Reform in 1994. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 41(2), 179–191.
- Rao, M. G. (2000). Fiscal Decentralization In Vietnam: Emerging Issues. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 41(2), 163–177.
- Ratmono, D., & Darsono, D. (2022). New public management and corruption : Empirical evidence of local governments in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 54–62. [https://doi.org/10.21511/pmf.11\(1\).2022.05](https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.05)
- Rohitarachoon, P., & Hossain, F. (2012). Decentralized Recruitment and Selection in Thailand : Friend or Foe to Local Public Administration? *International Journal of Public Administration*, 35, 553–561. <https://doi.org/10.1080/01900692.2011.653513>
- Santoso, R. S., Warsono, H., Astuti, R. S., & Dwimawanti, I. H. (2023). A comparative study of regional government in Central Java , Indonesia , public service innovation capacity management model for regional government Keyword s. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 10(2), 70–86. <https://doi.org/10.18488/74.v10i2.3487>
- Shola, A. T., & Jijoho, O. S. (2021). Local Governments and the Conundrum of Service Delivery in Nigeria : What Policy Implications? *International Journal of Policy and Administration*

- Research*, 8(2), 21–37. <https://doi.org/10.18488/journal.74.2021.82.21.37>
- Stone, S. B. (2015). The Effect of Fiscal Decentralization on the Financial Condition of Municipal Government. *International Journal of Public Administration*, 38, 453–460. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.949740>
- Tambulasi, R. I. . (2007). Who is fooling who? New public management-oriented management accounting and political control in the Malawi's local governance. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 3(3), 302–328. <https://doi.org/10.1108/18325910710820319>
- Taplin, R., Rusmin, R., & Brown, A. (2013). Financial Discrepancies in Political Party Funding by Indonesian Local Government Authorities. *International Journal of Public Administration*, 36, 16–25. <https://doi.org/10.1080/01900692.2012.713287>
- Trettel, M. (2021). Democratic innovations in (subnational) constitution-making: the institutionalized case (s) of the Italian Provinces of Trento and Bolzano. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 34(5), 782–802. <https://doi.org/10.1080/13511610.2021.1997574>
- Turati, G., Montolio, D., & Piacenza, M. (2016). Funding and School Accountability: The Importance of Private and Decentralised Public Funding for Pupil Attainment. *Fiscal Studies*. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12112>.This
- Turner, M. (2007). From commitment to consequences. *Public Management Review*, 8(2), 253–272. <https://doi.org/10.1080/14719030600587471>
- Vyas, L. (2018). Customization in Civil Service Training: Implications for Outsourcing Human Resources Management Customization in Civil Service Training: Implications for Outsourcing Human Resources Management. *International Journal of Public Administration*, 00(00), 1–14. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1390764>
- Xue, Q., Wang, H., Ji, X., & Wei, J. (2023). Local government centralization and corporate ESG performance: Evidence from China ' s county-to-district reform. *China Journal of Accounting Research*, 16(3), 100314. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2023.100314>
- Yamada, K. (2016). Crucial Decisions By Small Towns and Villages: Why Did Some Municipalities Choose to Merge But Others Did Not During the Nationwide Wave of Municipal Mergers in Japan? Crucial Decisions By Small Towns and Villages: Why Did Some Municipalities Choose to. *International Journal of Public Administration* ISSN: <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1028632>
- Zhang, Y., & Zhu, X. (2019). The Moderating Role of Top-Down Supports in Horizontal Innovation Diffusion. *Public Administration Review*, 00(00), 1–13. <https://doi.org/10.1111/puar.13140>
- Zhao, Z. J. (2009). Fiscal Decentralization and Provincial-Level Fiscal Disparities in China: A Sino-U.S. Comparative Perspective. *Public Administration Review*, (Special).